

Judul : Legislator DPR dukung Purbaya: reformasi DJBC tanpa kompromi
Tanggal : Minggu, 30 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Legislator DPR Dukung Purbaya

Reformasi DJBC Tanpa Kompromi

Legislator Senayan mendukung upaya perbaikan besar-besaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang dicanangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Perbaikan itu dipandang sudah jadi kebutuhan mendesak.

ANGGOTA Komisi XI DPR Tommy Kurniawan menyebut, reformasi instansi itu harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Karena, ada berbagai persoalan yang selama ini membayangi kinerja lembaga itu.

Salah satu persoalan adalah praktik praktik pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari nilai sebenarnya atau *under invoicing*. "Praktik itu berdampak pada berkurangnya setoran bea masuk maupun bea keluar kepada negara," ujar Tommy dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

Salah satu kasus *under invoicing* yang terungkap adalah saat Purbaya melakukan sidak di salah satu kantor Bea Cukai. Misalnya, ditemukan barang yang masuk tercatat hanya bernilai 7 dolar AS atau sekitar Rp 116 ribu, padahal harga pasarnya bisa

mencapai Rp 40-50 juta.

Menurut Legislator Fraksi PKB itu, masalah *under invoicing* bukan persoalan kecil. Negara bisa dirugikan dalam jumlah besar. "Karena itu, ketika Pak Purbaya meminta DJBC berbenah, saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah tersebut," ujarnya.

Selain itu, dia menyoroti masih mudahnya barang-barang ilegal masuk ke Indonesia, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik kongkalikong di internal aparat kepabeanan. Praktik kotor itu makin menegaskan perlunya pengawasan ketat dan evaluasi mendalam terhadap tata kelola DJBC.

"Ini jelas menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus ditutup. Menkeu harus tegas, dan DJBC harus berani melakukan



Tommy Kurniawan

pembenahan internal secara terbuka," tambahnya.

Tommy yakin, DJBC mampu melakukan perubahan dan kembali mendapatkan kepercayaan publik setelah mendapat banyak sorotan negatif. Dengan komitmen kuat dari pimpinan Kemenkeu serta kerja sama di internal DJBC, reformasi dapat berjalan efektif.

Selanjutnya, dia yakin DJBC bisa menghasilkan pelayanan kepabeanan yang lebih profesional serta bebas dari praktik-

praktik menyimpang. "Saya optimis DJBC bisa berenang, tidak tenggelam dalam masalah. Dengan perbaikan nyata, saya yakin DJBC dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan negara," katanya.

Ketua Komisi XI Mukhammad Misbakhun menambahkan, kegiatan dan pelayanan DJBC berhubungan dengan kedaulatan dan kemandirian negara. Sehingga, lembaga tersebut harus bisa melakukan perbaikan dan kembali mendapat kepercayaan penuh masyarakat.

Terkait ancaman Purbaya yang akan membekukan DJBC jika tidak melakukan perbaikan, Misbakhun menyerahkan sepenuhnya pada sang menteri. Kesempatan satu tahun yang diberikan Purbaya pada DJBC harus dimanfaatkan dengan baik seluruh jajaran lembaga itu untuk introspeksi diri.

"Manfaatkan waktu sebaik mungkin, ikuti semua arahan, sehingga kekhawatiran masyarakat dan ancaman yang disampaikan Menkeu tidak jadi kenyataan," ucap legislator Fraksi Partai

Golkar itu.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan, DJBC terancam dibekukan karena kinerja yang kurang memuaskan di mata pimpinan tertinggi negara hingga masyarakat. Selain soal *under invoicing* yang dijabarkan Tommy sebelumnya, kasus Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), hingga bocornya impor beras ilegal 250 ton melalui Sabang, Aceh, juga jadi sorotan.

"Kita akan bereskan. DJBC sudah saya panggil untuk rapat internal. Kita diskusi, dan saya bilang, image DJBC kurang bagus, jadi harus kita perbaiki," tegas Purbaya.

Purbaya sudah meminta waktu untuk membenahi DJBC selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, terdapat ancaman bahwa DJBC bisa dibekukan, sehingga nasib 16 karyawan berada di ujung tanduk.

"Saya biarkan, saya beri waktu untuk memperbaiki DJBC, karena ini ancaman serius," pungkasnya. ■ PYB